



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 23 TAHUN 2025

**TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu disusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga belum terpenuhi karena belum ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025-2029, perlu ditetapkan Rancangan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 melalui

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rancangan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

6. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 dan Menteri Keuangan Nomor 1/MK.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output* dalam Perencanaan dan Penganggaran;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 Perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rancangan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan anggaran, serta digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan serta pelaporan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun 2025.

- KETIGA : Rancangan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai bahan masukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- KEEMPAT : Perubahan sasaran kinerja dan anggaran sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA dapat dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran dan akan disampaikan oleh Sekretaris Utama/Pejabat yang ditunjuk kepada Unit Organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025-2029 dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rizaldi Morintosh

- 1 -

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 Februari 2025

**RANCANGAN RENCANA KERJA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2025**

Unit Organisasi	Kode	P/SP/IKSP/K/SK/IKSK/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Ribu Rp)	Tagging Informasi Kinerja
	106				166,711,994	
LKPP	Visi	V.01-Terwujudnya LKPP sebagai Penggerak Utama Transformasi Pengadaan yang Inklusif, Kredibel dan Berkelanjutan untuk [Visi RPJMN]				
LKPP	Misi	01-Menguatkan transformasi tata kelola peningkatan kinerja pengadaan yang inklusif, kredibel, dan berkelanjutan				
LKPP	Misi	02-Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.				
LKPP	Tujuan	01-Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional				
LKPP	Tujuan	02-Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP				
LKPP	SS	01-Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional				Tujuan 1
LKPP	IKSS	01 Indeks kinerja pengadaan	50.77	Indeks		
LKPP	SS	02-Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan				Tujuan 1
LKPP	IKSS	01 Indeks penerapan tata kelola pengadaan	54.62	Indeks		
LKPP	SS	03-Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP				Tujuan 2
LKPP	IKSS	01 Nilai reformasi birokrasi	A	Predikat		
	P	106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional			37,269,091	
	SP	01-Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital				SS.01
D2	IKSP	01-Persentase digitalisasi proses pelaksanaan PBJ	57	Persen		IKSS.01.01
D2	IKSP	02-Indeks kepuasan pengguna platform pengadaan nasional	81.45	Indeks		IKSS.01.01
D2	IKSP	03-Jumlah inovasi pengembangan platform pengadaan nasional	6	Angka		IKSS.01.01
	SP	02-Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional				SS.01
D1	IKSP	01- Persentase transaksi pembelian produk berkelanjutan pada sistem pengadaan pemerintah	50	Persen		IKSS.01.01
D2	IKSP	02-Persentase transaksi produk ber-TKDN pada pasar digital pengadaan	10	Persen		IKSS.01.01
D1	IKSP	03-Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK	11	Persen		IKSS.01.01
D4	IKSP	04-Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95%	50	Persen		IKSS.01.01
D4	IKSP	05-Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40%	95	Persen		IKSS.01.01
	SP	03-Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan				SS.01
D4	IKSP	01-Persentase efisiensi paket konsolidasi	15	Persen		IKSS.01.01
D4	IKSP	02-Skor efektivitas probity advice dan advokasi	100	Skor		IKSS.01.01
D4	IKSP	03-Indeks potensi risiko korupsi pada pengadaan	3.5	Indeks		IKSS.01.01
	SP	04-Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ				SS.02
D1	IKSP	01-Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ	Baik	Predikat		IKSS.02.01
	SP	05-Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ				SS.02
D3	IKSP	01-Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten	304	K/L/Pemda		IKSS.02.01
D3	IKSP	02-Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	467	K/L/Pemda		IKSS.02.01
	SP	06-Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan				SS.02
D4	IKSP	01-Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan	59	Persen		IKSS.02.01
	K	6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa			6,005,549	
	SK	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa				SP.04
D11	IKSK	01-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	3	Rancangan Peraturan		IKSP.04.01
D12	IKSK	02-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	2	Dokumen		IKSP.04.01
D13	IKSK	03-Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan	1	Dokumen		IKSP.04.01
D13	IKSK	04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional	1	Rekomendasi		IKSP.04.01
	SK	02-Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan				SP.04

Unit Organisasi	Kode	P/SP/IKSP/K/SK/IKSK/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Ribu Rp)	Tagging Informasi Kinerja
D12	IKSK	01-Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	15	Desa		IKSP.04.01
	SK	03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus dan KPBU				SP.04
D12	IKSK	01-Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan	100	Persen		IKSP.04.01
D12	IKSK	02-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus	100	Persen		IKSP.04.01
D12	IKSK	03-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus	100	Persen		IKSP.04.01
	KRO	AAC-Peraturan Pemerintah				
D11		111-Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1	RPP	520,000	SK.6319.01
	KRO	AAH-Peraturan lainnya				
D11		111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	2	Rancangan Peraturan	400,000	SK.6319.01
	KRO	ABL-Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
D11		111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	4	Rekomendasi Kebijakan	1,810,255	SK.6319.01
	KRO	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
D12		124-Model Dokumen PBJ Khusus	2	NSPK	360,000	SK.6319.01
	KRO	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
D12		123-Instansi/Proyek Yang Mendapatkan Pendampingan/Diberikan Pendapat Dalam PBJ Khusus	5	Lembaga	540,812	SK.6319.03
	KRO	PAH-Peraturan lainnya				
D13	PN	131-Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan	1	Rancangan Peraturan	140,639	SK.6319.01
	KRO	PEC-Kerja sama				
D13	PN	131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional	2	Kegiatan	668,974	SK.6319.01
	KRO	UBB -Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				
D12	PN	121-Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	5	Desa	1,200,000	SK.6319.02
	KRO	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				
D13	PN	131-Pemangku Kepentingan Yang Mendapatkan Akses Informasi Mengenai BBJP Dalam Kerangka Kerjasama Internasional	200	Orang	364,869	SK.6319.01
	K	6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ			11,394,378	
	SK	01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional				SP.01
D21	IKSK	01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	3	Laporan		IKSP.01.02
D21	IKSK	02-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional	58	Laporan		IKSP.01.01
D21	IKSK	03-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda	46	Laporan		IKSP.01.01
D21	IKSK	04-Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah	1	Buku		IKSP.01.01
D21	IKSK	05-Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional	9	Kajian		IKSP.01.03
	SK	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional				SP.01
D22	IKSK	01-Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional	1	Layanan		IKSP.01.03
D22	IKSK	02-Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung	1	Layanan		IKSP.01.02
D23	IKSK	03-Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan	1	Modul		IKSP.01.03
	SK	03-Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan				SP.02
D23	IKSK	01-Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	200,000	Produk		IKSP.02.02
	SK	04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda				SP.01
D21	IKSK	01-Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan	124	K/L/Pemda		IKSP.01.01
D21	IKSK	02-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95%	324	K/L/Pemda		IKSP.01.01
D21	IKSK	03-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40%	521	K/L/Pemda		IKSP.01.01
	KRO	BAH-Pelayanan Publik Untuk Lembaga				

Unit Organisasi	Kode	P/SP/IKSP/K/SK/IKSK/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Ribu Rp)	Tagging Informasi Kinerja
D21		211-Layanan Sistem Perencanaan PBJ	1	Layanan	845,456	SK.6320.04
	KRO	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				
D21		211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	4	Laporan	1,117,900	SK.6320.01
	KRO	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan				
D22		221-Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital	1	Layanan	7,521,299	SK.6320.02
	KRO	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan				
D23	PN	231 - Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi	1	Modul Aplikasi	1,000,000	SK.6320.02
	KRO	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk				
D23		231-Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan	200,000	Produk	909,723	SK.6320.03
	K	6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya			11,016,071	
	SK	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten				
D31	IKSK	01-Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	10,570	Orang		SP.05
D31	IKSK	02-Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	1,675	Orang		IKSP.05.01
D31	IKSK	03-Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	10	Orang		IKSP.05.01
PUSLAT	IKSK	04-Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ	1,300	Orang		IKSP.05.01
PUSLAT	IKSK	05-Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ	12,000	Orang		IKSP.05.01
PUSLAT	IKSK	06-Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ	1,110	Orang		IKSP.05.01
PUSLAT	IKSK	07-Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ	12,110	Orang		IKSP.05.01
PUSLAT	IKSK	08-Jumlah Peserta Pelatihan Anti korupsi PBJ	200	Orang		IKSP.05.01
PUSLAT	IKSK	09-Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ	400	Orang		IKSP.05.01
D33	IKSK	10- Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4,860	Orang		IKSP.05.01
D33	IKSK	11- Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi	600	Orang		IKSP.05.01
D33	IKSK	12-Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ	20	Orang		IKSP.05.01
D33	IKSK	13-Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ	70	Indeks		IKSP.05.01
	SK	02-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ				SP.05
	IKSK	01-Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	467	UKPBJ		IKSP.05.02
	IKSK	02-Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif	1	UKPBJ		IKSP.05.02
	KRO	ABQ-Kebijakan Bidang Aparatur				
D31		311-Rekomendasi Kebijakan Teknis SDM dan Kelembagaan PBJ	1	Rekomendasi Kebijakan	230,062	SK.6321.02
	KRO	ADD-Standarisasi Lembaga				
D33		331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	5	Lembaga	197,158	SK.6321.01
	KRO	ADG-Standarisasi Profesi dan SDM				
D33		331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75	Orang	492,000	SK.6321.01
	KRO	ADI-Sertifikasi Profesi dan SDM				
D33		331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5480	Orang	2,115,557	SK.6321.01
	KRO	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
D33		331-Pedoman Sertifikasi PBJP	1	Pedoman	133,240	SK.6321.01
D33		332-Materi Uji Sertifikasi PBJP	20	NSPK	466,042	SK.6321.01
PUSLAT		511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	5	NSPK	450,000	SK.6321.01
PUSLAT		512-Pedoman Pelatihan PBJ	4	Pedoman	194,698	SK.6321.01
	KRO	CAA-Sarana Bidang Pendidikan				
PUSLAT		511-Media Pembelajaran Berbasis TIK	5	Paket	586,476	SK.6321.01
	KRO	CCL-OM - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				

Unit Organisasi	Kode	P/SP/IKSP/K/SK/IKSK/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Ribu Rp)	Tagging Informasi Kinerja
D33		331-Sarana Sertifikasi PBJP	196	Unit	304,032	SK.6321.01
	KRO	DCF-Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan				
PUSLAT		511- Peserta Pelatihan PBJ	16000	Orang	1,303,566	SK.6321.01
		512- Sumber Daya Manusia yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	400	Orang	300,000	SK.6321.01
	KRO	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				
PUSLAT		511-Laporan Penjaminan Mutu Pelatihan Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	5	Laporan	484,042	SK.6321.01
	KRO	PDE-Akreditasi Lembaga				
D31	PN	311-UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	35	Lembaga	2,754,381	SK.6321.02
	KRO	PDH-Akreditasi Profesi dan SDM				
D31	PN	311-SDM PBJ dan Non-JF PBJ	550	Orang	554,817	SK.6321.01
	KRO	SCF-Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan				
PUSLAT	PN	511-Peserta Pelatihan Antikorupsi PBJ	200	Orang	450,000	SK.6321.01
	K	6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum			4,633,195	
	SK	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan				SP.03
	IKSK	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	2	K/L/Pemda		IKSP.03.03
	SK	02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probitiy Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa				SP.03
	IKSK	01-Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh K/L	2	Kegiatan		IKSP.03.01
	IKSK	02-Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada K/L	14	Kegiatan		IKSP.03.02
	IKSK	03-Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemda	40	Kegiatan		IKSP.03.01
	IKSK	04-Jumlah kegiatan probity advice yang dilakukan di Pemda	27	Kegiatan		IKSP.03.02
	IKSK	05-Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemda	150	Kegiatan		IKSP.03.02
	SK	03-Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif				SP.06
	IKSK	01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house pengadaan	56	K/L		IKSP.06.01
	IKSK	02-Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house pengadaan	120	Pemda		IKSP.06.01
	SK	04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ				SP.06
	IKSK	01-Persentase layanan PKA yang Optimal	30	Persen		IKSP.06.01
	IKSK	02-Persentase layanan LPS yang Optimal	30	Persen		IKSP.06.01
	IKSK	03-Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal	30	Persen		IKSP.06.01
	IKSK	04-Jumlah instansi/stakeholder yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan	4	Lembaga		IKSP.06.01
	KRO	FAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan				
D41		413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probitiy Advice, Konsolidasi pengadaan dan/atau Advokasi	16	K/L	450,666	SK.6322.02
D42		423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probitiy Advice, Konsolidasi pengadaan dan/atau Advokasi	150	Pemda	838,354	SK.6322.02
D43		431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	4	Lembaga	211,992	SK.6322.04
		414-Kementerian/Lembaga yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House pengadaan	6	K/L	500,000	SK.6322.03
		424-Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/menyelenggarakan Clearing House pengadaan	20	Pemda	859,954	SK.6322.03
	KRO	BCE-Penanganan Perkara				
D43		431-Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani	500	Perkara	511,107	SK.6322.04
		432-Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas	25	Perkara	504,837	SK.6322.04
		433-Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal	400	Perkara	486,503	SK.6322.04
	KRO	UAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan				
D43	PN	431-K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan	2	Lembaga	269,782	SK.6322.01
	K	6323-Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ			4,219,898	
	SK	01-Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan				SP.02
D13	IKSK	01-Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP	10%	Persen		IKSP.02.01

Unit Organisasi	Kode	P/SP/IKSP/K/SK/IKSK/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Ribu Rp)	Tagging Informasi Kinerja
	SK	02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK				SP.02
D41	IKSK	01-Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ	68	K/L		IKSP.02.04 IKSP.02.05
D42	IKSK	02-Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ	100	Pemda		IKSP.02.04 IKSP.02.05
	SK	03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK				SP.02
D11	IKSK	01-Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	500	UMKK		IKSP.02.03
D13	IKSK	02-Persentase peningkatan pelaku UMKK yang terlibat dalam PBJ	17%	Persen		IKSP.02.03
	KRO	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM				
D11	PN	111-Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	500	UMKM	440,000	SK.6323.03
D13	PN	131-Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	500	UMKM	719,857	SK.6323.03
	KRO	FAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan				
D41		411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	68	K/L	993,900	SK.6323.02
D42		421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	100	Pemda	1,362,455	SK.6323.02
	KRO	PDA - Standarisasi Produk				
D13	PN	131 - Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan yang Masuk dalam Sistem Pengadaan Pemerintah	2	Produk	337,237	SK.6323.01
	KRO	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
D13	PN	131- K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	2	Lembaga	366,449	SK.6323.01
	P	106.WA-Dukungan Manajemen			129,442,903	
	SP	07-Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP				SS.03
SES	IKSP	01-Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal	78	Persen		IKSS.03.01
SES	IKSP	02-Nilai AKIP	Sangat Baik	Predikat		IKSS.03.01
SES	IKSP	03-Opini BPK	WTP	Opini BPK		IKSS.03.01
	K	5664-Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP			927,860	
	SK	01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi				SP.07
INSP	IKSK	01-Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4	33.33	Persen		IKSP.07.01
INSP	IKSK	02-Indeks Pengelolaan Integritas	Cukup	Predikat		IKSP.07.01
INSP	IKSK	03-Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	72	Persen		IKSP.07.02
INSP	IKSK	04-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	80	Persen		IKSP.07.03
	KRO	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				
INSP		965-Layanan Audit Internal	12	Dokumen	418,185	SK.5664.01
	KRO	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				
		962-Layanan Umum	9	Dokumen	509,675	SK.5664.01
	K	6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum			5,742,195	
	SK	01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi				SP.07
BHOSDM	IKSK	01-Indeks Kualitas Kebijakan	Baik	Predikat		IKSP.07.01
BHOSDM	IKSK	02-Indeks Reformasi Hukum	Istemewa	Predikat		IKSP.07.01
BHOSDM	IKSK	03-Skor komposit evaluasi kelembagaan	77	Skor		IKSP.07.01
BHOSDM	IKSK	04-Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	100	Persen		IKSP.07.01
BHOSDM	IKSK	05-Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100	Persen		IKSP.07.01
BHOSDM	IKSK	06-Indeks berAKHLAK	Cukup Sehat	Predikat		IKSP.07.01
BHOSDM	IKSK	07-Indeks sistem merit	Baik	Predikat		IKSP.07.01
	KRO	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				

Unit Organisasi	Kode	P/SP/IKSP/K/SK/IKSK/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Ribu Rp)	Tagging Informasi Kinerja
BHOSDM		957-Layanan Hukum	1	Layanan	306,536	SK.6598.01
BHSODM		960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	1,193,225	SK.6598.01
BHOSDM		969-Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	386,458	SK.6598.01
	KRO	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				
BHOSDM		954-Layanan Manajemen SDM	3	Layanan	3,855,976	SK.6598.01
	K	6599-Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan			68,715,427	
	SK	01-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran				SP.07
BPKEU	IKSK	01-Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Sangat baik	Predikat		IKSP.07.02
BPKEU	IKSK	02-Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Baik	Predikat		IKSP.07.01
BPKEU	IKSK	03-Indeks maturitas SPIP	Level 3	Predikat		IKSP.07.01
BPKEU	IKSK	04-Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi pada pengelolaan keuangan	5	Persen		IKSP.07.03
	KRO	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				
BPKEU		994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	65,901,318	SK.6599.01
	KRO	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				
BPKEU		952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6	Dokumen	950,966	SK.6599.01
BPKEU		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen	737,305	SK.6599.01
BPKEU		955-Layanan Manajemen Keuangan	17	Dokumen	1,125,838	SK.6599.01
	K	6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran			44,938,473	
	SK	01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas				SP.07
BHU	IKSK	01-Indeks pelayanan publik	Baik	Predikat		IKSP.07.01
BHU	IKSK	02-Indeks keterbukaan informasi publik	Menuju informatif	Predikat		IKSP.07.01
BHU	IKSK	03-Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Tersedia	Predikat		IKSP.07.01
	SK	02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal				SP.07
BHU	IKSK	01-Hasil pengawasan kearsipan	Memuaskan	Predikat		IKSP.07.01
BHU	IKSK	02-Indeks tata kelola pengadaan	Sangat baik	Predikat		IKSP.07.01
BHU	IKSK	03-Indeks pengelolaan aset	3.35	Indeks		IKSP.07.01
BHU	IKSK	04-Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan	Baik	Predikat		IKSP.07.01
BHU	IKSK	05-Indeks layanan keprotokolan	Baik	Predikat		IKSP.07.01
BHU	IKSK	06-Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan	Memuaskan	Predikat		IKSP.07.01
	KRO	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				
BHU		956-Layanan BMN	1	Layanan	466,690	SK.6600.02
BHU		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6	Layanan	2,214,016	SK.6600.01
BHU		959-Layanan Protokoler	1	Layanan	1,110,375	SK.6600.02
BHU		962-Layanan Umum	1	Layanan	5,732,269	SK.6600.02
BHU		994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	34,801,713	SK.6600.02
	KRO	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal				
BHU		974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	613,410	SK.6600.02
	K	7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK			9,118,948	
	SK	01-Terwujudnya Layanan Data yang Informatif				SP.07
PUSDATIN	IKSK	01-Nilai Indeks Pembangunan Statistik	2.9	Indeks		IKSP.07.01
PUSDATIN	IKSK	02-Persentase Pemenuhan Data Prioritas	100	Persen		IKSP.07.01
	SK	02-Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ				SP.07
PUSDATIN	IKSK	01-Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran	30	Persen		IKSP.07.01
PUSDATIN	IKSK	02-Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30	Persen		IKSP.07.01

Unit Organisasi	Kode	P/SP/IKSP/K/SK/IKSK/KRO/RO	Volume	Satuan	Anggaran (Ribu Rp)	Tagging Informasi Kinerja
PUSDATIN	IKSK	03-Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran	100	Persen		IKSP.07.01
PUSDATIN	IKSK	04- Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100	Persen		IKSP.07.01
	SK	03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif				SP.07
PUSDATIN	IKSK	01-Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran	100	Persen		IKSP.07.01
PUSDATIN	IKSK	02-Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi	100	Persen		IKSP.07.01
PUSDATIN	IKSK	03-Nilai Cyber Security Maturity (CSM)	4.2	Nilai		IKSP.07.01
PUSDATIN	IKSK	04-Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani	85	Persen		IKSP.07.01
	SK	04-Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel				SP.07
PUSDATIN	IKSK	01-Nilai SAKIP Pusdatin	65	Nilai		IKSP.07.01
PUSDATIN	IKSK	02-Nilai Indeks SPBE	3.7	Indeks		IKSP.07.01
PUSDATIN	IKSK	03-Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin	3.2	Nilai		IKSP.07.01
	KRO	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				
PUSDATIN		963-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1,771,013	SK.7033.04
	KRO	BMA-Data dan Informasi Publik				
PUSDATIN		963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1	Layanan	1,309,245	SK.7033.01
	KRO	CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
PUSDATIN		963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	16	Unit	4,529,180	SK.7033.03
	KRO	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan				
PUSDATIN		963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	Sistem Informasi	1,509,510	SK.7033.02

Keterangan :

- P : Program
- SP : Sasaran Program
- IKSP : Indikator Kinerja Sasaran Program
- K : Kegiatan
- SK : Sasaran Kegiatan
- IKSK : Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
- KRO : Klasifikasi Rincian Output
- RO : Rincian Output
- PN : Prioritas Nasional

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI